

BAB VII

PENUTUP

Beberapa hal penting yang dapat dirangkum melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lamandau ini, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana pada pasal 67 menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Sesuai dengan perkembangannya, Kabupaten Lamandau memiliki luas berdasarkan tata batas Kabupaten luas semula 6.414 Km² bertambah menjadi 7.846,91 Km² (luas indikatif). Sampai dengan tahun 2017 batas wilayah yang sudah definitif adalah Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau (Permendagri Nomor 38 Tahun 2017), Batas Daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan (Permendagri Nomor 40 tahun 2017), Batas Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah (Permendagri Nomor 82 tahun 2017). Sedangkan batas daerah yang masih indikatif batas daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Sukamara.
3. Penduduk Kabupaten Lamandau berdasarkan data SIAK tahun 2017 mencapai 86.643 jiwa terdiri dari Laki-laki 45.744 jiwa (52,80persen) dan Perempuan 40.899 jiwa (47,20persen), dengan laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2017 sebesar 1,02persen. Dimana jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bulik sebanyak 11.190 jiwa, diikuti kecamatan Sematu Jaya 3.870 jiwa dan kecamatan Mentohi Raya 3.570 jiwa.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lamandau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2016 IPM Kabupaten Lamandau sebesar 68,54 meningkat sebesar 2,05 dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak tahun 2011 dimana IPM pada saat itu sebesar 65,99 atau masuk kategori sedang berdasarkan Skala Internasional dan menempati urutan ke - 7 di wilayah Kalteng setelah Kota Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Barito Timur, Gunung Mas, Kotawaringin Timur dan Barito Selatan.
5. Faktor Pembentukan IPM yaitu :
 - a. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten lamandau pada Tahun 2016 mencapai 69,20 tahun. Meningkat dari tahun 2011 sebesar 68,81 tahun artinya ada peningkatan rata-rata umur penduduk lebih panjang 0,3 dari tahun 2012.
 - b. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lamandau Tahun 2016 sebesar 12,44 tahun meningkat dari tahun 2012 sebesar 11,34 tahun. Artinya dalam kurun waktu lima tahun penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca menulis meningkat 1,1 persen.

- c. Rata-rata lama sekolah (RLS) pada Tahun 2012 sebesar 7,38 tahun meningkat pada Tahun 2016 sebesar 7,68 tahun. Ini berarti pada umumnya penduduk usia 25 Tahun ke atas di Kabupaten Lamandau menempuh pendidikan sampai 1 SMP Semester 2. Kebijakan yang bisa meningkatkan RLS adalah dengan beasiswa bagi yang kurang mampu dan siswa berprestasi, bebas uang sekolah, pencanangan wajib belajar 12 tahun.
 - d. Selain HLS dan RLS, parameter keberhasilan pembangunan pendidikan juga ditandai Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada Tahun 2017, untuk APK terdapat 2,58 persen penduduk diluar usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI. Untuk APM tertinggi tahun 2017 terdapat pada jenjang SD/MI dimana ada sebesar 102,14 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang mengenyam pendidikan SD/MI.
6. Pada tahun 2017 prioritas pengeluaran penduduk Kabupaten Lamandau masih didominasi untuk keperluan non makanan yaitu 52,70 persen, sementara untuk konsumsi makanan sebesar 47,30 persen.
 7. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau berdasarkan hasil Kajian didominasi *sub sektor Pertanian* dengan komoditas unggulan kedelai dan kacang hijau; *sub sektor Perkebunan dan Hortikultura* dengan komoditas unggulan lada dan durian; *sub sektor peternakan* dengan komoditas unggulan domba dan kambing.
 8. Pariwisata juga merupakan Produk Unggulan Daerah dengan melihat potensi alam, perbukitan, jeram, air terjun serta adat budaya yang kaya dan beranekaragam. Disamping pula lokasi Kabupaten Lamandau yang tidak jauh dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Harapannya obyek wisata di Kabupaten Lamandau bisa menjadi obyek wisata mandiri dengan persiapan infrastruktur pariwisata, ekonomi kerakyatan, kearifan lokal.
 9. PDRB berdasarkan Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.358,67 Milyar meningkat menjadi 3.076,70 Milyar di Tahun 2016 atau terjadi peningkatan selama kurun waktu 5 tahun sebesar Rp. 718,03 Milyar. Sedangkan berdasarkan Harga Berlaku (ADHB) yaitu sebesar Rp. 2.725,29 milyar pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 4.061,46 milyar pada tahun 2016 atau selama kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.336,17 milyar.
 10. Perekonomian Kabupaten Lamandau pada Tahun 2016 mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,75persen dari semula di tahun sebelumnya 2015 sebesar 6,75persen. Perlambatan dialami oleh 4(empat) Kabupaten lainnya yakni Sukamara, Seruyan, Katingan, Barito Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau yang melambat ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami perlambatan tahun 2016, yaitu pada poin 6,36 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 disebabkan sektor pertambangan dan penggalian sebagai penyumbang kontribusi terbesar kedua pertumbuhannya mengalami perlambatan yang dratis menjadi -6,55 persen. Kategori Industri Pengolahan mengalami peningkatan menjadi 10,43 persen. Kategori Konstruksi mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 10,58 persen.

11. Pertumbuhan PDRB per Kapita berdasarkan Harga Konstan (ADHK) menggambarkan pertumbuhan nyata per kapita yang selalu meningkat sejak Tahun 2012. Saat itu pertumbuhan PDRB per kapita ADHK sebesar Rp. 34,89 Juta meningkat menjadi 40,4 Juta pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan kegiatan perekonomian Kabupaten Lamandau yang ditunjukkan melalui kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia menjadi lebih pesat seiring pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Lamandau.
12. Penduduk miskin di Kabupaten Lamandau selama tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 3.200 jiwa pada tahun 2011, turun menjadi 2.880 jiwa di tahun 2016, atau terjadi penurunan sebesar 320 jiwa dalam kurun waktu lima tahun, dengan tingkat kemiskinan yang juga mengalami penurunan yaitu tahun 2012 sebesar 4,66persen turun menjadi 3,80persen di tahun 2016, atau selama jangka waktu lima tahun tingkat kemiskinan Kabupaten Lamandau turun sebesar 0,86persen.
13. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lamandau tahun 2012 sebesar 0,92 persen terjadi kenaikan pada tahun 2013 sampai dengan 2015 terjadi peningkatan hingga 5 persen. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan angka TPT sebesar 1,35 persen karena adanya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan stabilitas harga serta upaya sinergitas peningkatan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja. Bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau dengan TPT sebesar 1,35 persen berada di posisi kedua setelah Gunung Mas (1,17 persen). Besaran TPT Kabupaten Lamandau tahun 2017 relatif berada di bawah Provinsi Kalimantan Tengah (4,23 persen).
14. Tingkat inflasi kota Nanga Bulik cenderung mengikuti kota Sampit sebagai rujukan/ acuan data Survey Biaya Hidup (SBH) karena kota Sampit sebagai mitra kota (*sister city*) memiliki kemiripan pola konsumsi, adat dan budaya karena letak geografisnya yang berdekatan. Secara Nasional laju inflasi pada tahun 2015 sejumlah 3,35 persen, dan pada tahun 2016 sejumlah 3,02 persen. Sedangkan laju inflasi di Kabupaten Lamandau pada tahun 2016 dengan tingkat inflasi year on year sejumlah 2,46 persen.
15. Secara umum tingkat ketimpangan / Gini Ratio (GR) yang terjadi di Kabupaten Lamandau relatif sedang, atau dengan kata lain distribusi pendapatan yang diterima penduduk belum merata. Hal ini tergambar dari GR Kabupaten Lamandau pada tahun 2016 sebesar 0,35 persen.
16. Berdasarkan 9 (sembilan) Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) dan isu strategis khususnya dinamika pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dihadapi tahun 2017, maka tema pembangunan tahun 2017 adalah: **“MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH”**, dengan 10 prioritas yakni: ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketentraman,

infrastruktur, pemerintahan, olahraga dan kebudayaan, keagamaan, pariwisata, lingkungan hidup.

17. Kebijakan Umum APBD TA. 2017 ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan DPRD Kabupaten Lamandau Nomor: 050/1403/Bapp.C/XI/2016 – Nomor: 170/900.1708/DPRD-LMD/XI/2016, tanggal 21 November 2016. Dan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA. 2017 ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan DPRD Kabupaten Lamandau Nomor: 050/910/Bapp.C/VIII/2017 – Nomor: 170/900.468/DPRD-LMD/VIII/2017, tanggal 2 Agustus 2017. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nomor : 12 Tahun 2016 Tentang APBD Kabupaten Lamandau TA. 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lamandau TA. 2017, Pemerintah Kabupaten Lamandau bersama unsur Legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2017.
18. Anggaran Belanja sebesar Rp. 954.769.434.457,- pada APBD 2017 dan menargetkan Pendapatan sebesar Rp. 896.040.783.701,- sehingga terdapat **defisit** anggaran sebesar Rp. 58.728.650.756,-. Realisasi pendapatan Sebesar Rp. 850.193.349.765,46 atau sebesar 94,88 persen dan realisasi Belanja sebesar dan Rp 880.067.699.475,88 atau sebesar 92,18 persen sehingga terdapat selisih **surplus** sebesar Rp. 74.701.734.981,12
19. Kontribusi pendapatan Daerah Tahun 2017 didominasi oleh Dana Perimbangan dengan realisasi sebesar 70,9 persen disusul oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar 17,44 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan realisasi sebesar 11,66 persen. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kerja keras dari Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat secara signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya 4,74 persen di tahun 2016 dan 5,05 persen di tahun 2015.
20. Dalam penyelenggaraan urusan tahun 2017 didasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Urusan di Kabupaten Lamandau pada tahun 2017 dibagi menjadi 4 (empat) yaitu : Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Fungsi Pendukung Urusan Pemerintah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.
21. Dana APBN untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) tahun 2017 sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan Urusan Bersama (UB) sebesar Rp. 3.569.835.000,- dengan total keseluruhan Rp. 9.569.835.000,-. DIPA Tugas Pembantuan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 6.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.832.082.000,- atau sebesar 97,20 persen sedangkan DIPA Urusan Bersama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 3.569.835.000,- terealisasi Rp. 3.565.431.500,- atau sebesar 99,88 persen.

22. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2017 disalurkan ke 85 desa berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2017 sejumlah Rp. 52.100.834.700,- (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
23. Pemerintah Kabupaten Lamandau pada tahun 2017 mengadakan kerjasama antar daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tercantum mengenai Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama dengan Pemerintah Kota mengenai Pengembangan Potensi Daerah.
24. Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamandau pada tahun 2017 yakni kerjasama dengan Pihak Ketiga : Dokter Spesialis Anestesi, Spesialis Anak, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Obygn, Spesialis Anestesi; BPJS Kesehatan Cabang Sampit; Laboratorium Kesehatan (BLK) Provinsi Kalimantan Tengah; Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Lamandau; CV. Viktech Infomedia Advertising; Universitas Brawijaya; Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya; Pimpinan Cabang Wilayah BRI di Pangkalan Bun; Kepala Pusat Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik (PSKEP); Bank Pembangunan Kalteng; Badan Pusat Statistik.
25. Koordinasi dengan instansi Vertikal yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui SKPD Tahun 2017 antara lain berupa rapat-rapat koordinasi; penyuluhan; penanganan bencana; sosial; Kamtibmas; penyusunan buku statistik; sertifikasi tanah masyarakat; seleksi dan pelatihan Paskibaraka; peningkatan kemampuan pemeriksa keuangan; penertiban bersama angkutan jalan dan sungai serta kegiatan bersama lainnya yang memiliki keterkaitan.
26. Tindak lanjut penanganan tata batas membuahkan hasil yang positif dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Permendagri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk tata batas dengan Kabupaten Ketapang masih terdapat dua segmen yaitu Desa Kubung Kecamatan Delang dan Desa Jemuat Kecamatan Batangkawa. Lain halnya dengan penanganan tata batas dengan Kabupaten Sukamara, dimana sampai dengan akhir tahun masih belum ada kata sepakat tentang titik batas antar dua kabupaten. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Sukamara tetap bersikukuh dengan klaim titik batas sesuai dengan versi mereka.
27. Dalam penanganan tata batas antar desa dan kecamatan pada tahun 2017 telah diajukan 37 Peraturan Bupati ke Gubernur Kalimantan Tengah. Namun ternyata sampai dengan akhir tahun 2017 Peraturan tersebut belum selesai diproses.

28. Kejadian Bencana yang terjadi di Kabupaten Lamandau sepanjang Tahun 2017 ada sebanyak 32 Kejadian terdiri atas kejadian kebakaran rumah, banjir dan angin putting beliung. Namun semuanya dapat diatasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan Dinas Sosial, Tagana dan instansi terkait lainnya.
29. Situasi dan kondisi dalam Tahun 2017 di Kabupaten Lamandau yang menyangkut masalah ketenteraman dan ketertiban umum dalam keadaan aman terkendali, dimana tidak terjadi konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lamandau dalam tahun ini dalam keadaan kondusif.

Indikator Pembangunan Manusia, Indikator Makro Ekonomi serta Indikator Pencapaian Kinerja menunjukkan perkembangan yang positif. Artinya bahwa penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lamandau sudah berjalan dengan baik.

Ini tidak terlepas dari sinergitas pihak eksekutif dan pihak legislatif dalam hal ini peran DPRD dalam mendukung baik dalam hal legislasi, anggaran dan pengawasan yang tentunya semakin menguatkan komitmen bersama untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lamandau sesuai dengan motto Kabupaten Lamandau “**Bahaum Bakuba**” yang artinya “musyawarah untuk mencapai mufakat”. Selain itu tentunya partisipasi masyarakat yang begitu besar dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten kita cintai bersama ini.

Namun demikian disadari pula dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan masih terdapat kekurangan baik karena keterbatasan dana, sarana, sumber daya manusia maupun infrastruktur sehingga tidak semua aspirasi masyarakat dapat terakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten tetap berkomitmen bersama dukungan lapisan masyarakat untuk bekerja dengan giat dalam memajukan daerah sehingga dapat sejajar bahkan lebih dari daerah yang lebih dulu maju sesuai dengan hakekat pembangunan yakni pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Demikian laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lamandau tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini disusun. Semoga bermanfaat dalam rangka memantapkan strategi dan kebijakan pembangunan daerah pada masa akan datang dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan semboyan Kabupaten Lamandau: “**Lamandau untuk Semua, Semua untuk Lamandau!**”

Nanga Bulik, Maret 2018

BUPATI LAMANDAU

